



PPDB Zonasi Masih Banyak 'Lubang' Sekolah Diminta Cek Ulang SKTM

YOGYA (KR) - Meski Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah selesai beberapa hari yang lalu, namun ternyata menimbulkan beberapa masalah yang cukup banyak. Selain adanya manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat pindah tugas juga munculnya kekecewaan anak yang kehilangan hak, karena posisi tempat tinggalnya tidak dekat dengan sekolah.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY maupun dinas pendidikan kabupaten/kota untuk melakukan pengecekan dan juga pengawasan secara ketat dugaan penyalahgunaan SKTM. "Adanya pemalsuan atau penyalahgunaan SKTM dalam seleksi PPDB yang terjadi di sejumlah daerah, mudah-mudahan tidak terjadi di DIY. Saya minta dinas pendidikan bisa lebih ketat un-

tuk mengawasi baik di tingkat satu maupun kabupaten/kota," kata Sri Sultan HB X, saat diminta tanggapan soal adanya pemalsuan SKTM di Kompleks Kepatihan, Rabu (11/7).

Menurut Sultan, pengecekan secara ketat harus dilakukan mulai dari proses pertama dikeluarkannya rekomendasi atau persetujuan untuk mendapatkan SKTM tersebut. Misalnya mulai dari tingkat RT/RW maupun kelurahan harus ada pengawasan agar SKTM yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran.

Kabid Perencanaan dan Standarisasi Disdikpora DIY, Didik Wardaya mengungkapkan, dalam Permendikbud No 14 Tahun 2018 dalam salah satu pasalnya menyatakan, apabila orangtua atau siswa menda-

patkan SKTM dengan cara curang (memalsukan data) akan dikenai sanksi dan dibatalkan haknya sebagai siswa di sekolah. (Berita terkait di halaman 10)

Lebih lanjut Didik menam-

bahkan, Disdikpora DIY akan terus melakukan pengawasan terhadap
"Bersambung hal 7 kol 5"

Sekolah Diminta Sambungan hal 1

kemungkinan adanya pemalsuan SKTM. Supaya pengawasan yang dilakukan bisa maksimal, sekolah yang memiliki posisi lebih dekat dengan siswa untuk terlibat aktif dalam pengawasan. Misalnya dengan melakukan *home visit* (kunjungan) ke rumah, sehingga bisa mengetahui kondisi anak yang sebenarnya. "Total pemegang SKTM untuk wilayah DIY ada sekitar 6.500 orang. Padahal total daya tampung untuk pemegang SKTM hanya 5.581 orang. Akibatnya ada beberapa pemegang SKTM yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri karena keterbatasan kuota," ungkapnya.

Komisisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listiyarti di Jakarta, menuturkan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 ini sedikit banyak telah melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri. Hal itu dikarenakan sejumlah faktor di antaranya minimnya sosialisasi ketentuan dalam PPDB 2018 ini.

Dengan kurangnya sosialisasi, membuat sistem zonasi yang merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan secara nasional menjadi tidak sesuai target. "Niat baik namun justru banyak menimbulkan kekebohan di masyarakat," katanya.

Sistem zonasi, kata Retno, menurut Mendikbud, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Karena, rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah.

Adanya siswa kehilangan haknya meraih kesempatan mendapatkan sekolah negeri disampaikan Sekretariat Bersama Pos Pengaduan PPDB DIY 2018 Ombudsman RI.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri, menjelaskan, penerapan zonasi di Kota Yogyakarta tidak dapat mengakomodir daerah-daerah

blank spot yang tidak masuk radius. Setidaknya ada 3 kecamatan di Kota, salah satunya Kecamatan Wirobrajan, tidak terjangkau radius zonasi sehingga banyak calon siswa yang berada di blank spot tersebut, tidak dapat bersekolah di sekolah negeri terdekat.

Ombudsman mencatat ada 91 temuan di lapangan baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun dari temuan selama pemantauan. "Persoalan yang banyak muncul dikeluhkan masyarakat antara lain akurasi data dan informasi SKTM dan jalur khusus, zonasi dan IT, penentuan domisili calon siswa dalam hal anak tidak tinggal (berdomisili) bersama orangtua yang alamatnya beda, hingga pungutan saat dan pasca PPDB," jelas Budhi.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana menyadari aturan PPDB Zonasi harus banyak disempurnakan. Pihaknya sudah berusaha untuk menyempurnakan sistem yang dilakukan yaitu mewajibkan pendaftar memilih 16 sekolah dan akan menambah kuota sebanyak 250 kursi di empat kecamatan di kawasan Selatan Kota Yogyakarta yang minim SMP Negeri agar masyarakat tidak dirugikan nantinya.

"Arahnya memang paling pas kalau mempertimbangkan jarak tempat tinggal pendaftar ke sekolah. Kita otomatis memerlukan peta RW se-kota Yogyakarta yang akurat ketika ukuran jarak RW pendaftar ke sekolah menjadi pertimbangan PPDB saat ini," ujar Edy kepada KR, Rabu (11/7).

Jika pendaftar memanfaatkan dengan 16 pilihan via jalur prestasi terlebih dahulu, nyatanya ada yang masuk SMP N 5 Yogyakarta hanya dengan NEM 13. Yang akhirnya menimbulkan protes karena masyarakat hanya memanfaatkan sedikit pilihan bukan maksimal sehingga tidak diterima di jalur prestasi dan zonasi. Untuk itu, pihaknya tengah menyempurnakan sistem tersebut. (Ria/Ira/Ati/Rdi/Lim/Jon)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005